

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan kerja sama yang melibatkan dua negara pada dasarnya tidak hanya dilakukan pada negara yang letak geografisnya berdekatan tetapi juga dua negara yang secara geografis letaknya berjauhan. Tujuan utama dari dilakukannya kerja sama bilateral antarnegara sendiri adalah membangun hubungan mitra yang kuat di luar lingkungan internalnya, yakni dengan menciptakan hubungan persahabatan dengan aktor hubungan internasional lain. Tentunya akhir dari kerja sama bilateral adalah untuk mencapai kepentingan nasional baik di sektor ekonomi, sosial, politik, dan keamanan.

Jika melihat dinamika hubungan kerja sama saat ini, sektor ekonomi menjadi kepentingan nasional utama yang ingin dicapai berbagai negara di dunia. Dalam mencapai kepentingan nasional di sektor ekonomi ini, kerja sama tidak hanya melibatkan negara atau *government to government* (G2G) tetapi juga melibatkan aktor lain yang terlibat langsung dalam pertumbuhan ekonomi yaitu pelaku usaha seperti perusahaan multinasional (MNCs). Dengan begitu kerja sama yang dilakukan adalah kerja sama antara pemerintah dengan para pelaku usaha (bisnis) atau yang dikenal juga dengan istilah *government to business* (G2B). Kerja sama itu pula yang telah lama dilakukan antara pemerintah Indonesia-Jepang dan Indonesia dengan perusahaan multinasional (MNCs) milik Jepang.

Hubungan bilateral Indonesia-Jepang dimulai sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara Indonesia dan Jepang pada April 1958. Hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Jepang sebagai 'Macan Asia' dengan menggerakkan kembali roda perekonomian Indonesia pasca Reformasi sekaligus untuk memulihkan stabilitas politik Indonesia. Sejak dimulainya hubungan bilateral Indonesia-Jepang hingga saat ini, Jepang masih memegang peranan yang cukup penting bagi perekonomian Indonesia. Jepang banyak terlibat dalam kerja sama perdagangan, investasi, maupun pemberian bantuan dalam rangka pembangunan Indonesia.

Untuk itu, sebagai langkah untuk mendorong kemajuan ekonomi masing-masing negara, disepakatinya perjanjian kerja sama bilateral di bidang ekonomi (*Indonesia-*

Japan Economy Partnership Agreement – IJEPA) yang ditandatangani kesepakatan antara Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Mr. Shinzo Abe di Jakarta, Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2007. Pengimplementasikan kesepakatan bagi kedua negara secara resmi dimulai sejak tanggal 1 Juli 2008. IJEPA sendiri merupakan bentuk kesepakatan ekonomi komprehensif (EPA) yang ditujukan tidak hanya untuk meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Jepang tetapi juga memfasilitasi pergerakan manusia, barang, dan modal. Kerja sama IJEPA dilandasi dengan tiga pilar, yaitu *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Facilitation* (pasar yang terbuka/dipermudah), dan *Cooperation* (kerja sama untuk *capacity building*). Dalam kesepakatan IJEPA, pilar *Cooperation* merupakan pilar yang cukup strategis bagi Indonesia. Hal ini karena pilar tersebut berfungsi meningkatkan kapasitas industri manufaktur Indonesia, sehingga diharapkan dapat membantu Indonesia menghasilkan produk-produk yang memenuhi persyaratan pasar Jepang dengan dibuka dua pilar lainnya. Dengan kondisi tersebut, akan tercipta *win-win condition* di antara kedua negara maupun persyaratan dari pasar global (Atmawinata et al., 2008:7).

Di dalam implementasi IJEPA, terdapat kesepakatan *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) yang diposisikan sebagai motor pembangunan kapasitas industri (*industrial capacity building*) untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur Indonesia. MIDEC khususnya diperuntukkan untuk mendukung pengembangan 13 sektor kegiatan ekonomi Indonesia di industri manufaktur, antara lain pekerjaan logam, *mould and dies*, konservasi energi, investasi & promosi industri ekspor, usaha kecil dan menengah (UKM), otomotif, listrik/elektronik, produk besi dan baja, tekstil, petro dan oleo kimia, produk logam bukan besi, dan makanan dan minuman yang diaplikasikan melalui 26 proyek kegiatan berupa kegiatan studi dasar, bantuan teknis, pelatihan, pembuatan dan penerapan sistem (Atmawinata et al., 2008:8-9).

MIDEC juga dapat diartikan sebagai strategi pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) pekerja Indonesia dalam bentuk kerja sama teknis. UNDP dan CIDA mendefinisikan *capacity building* merupakan suatu proses yang dialami oleh manusia untuk meningkatkan kemampuan mereka agar mampu melaksanakan fungsi dasar dalam memecahkan masalah, menetapkan, dan mencapai tujuan, serta memahami dan mampu menangani kebutuhan pengembangan diri di dalam lingkungan yang lebih luas secara berkelanjutan (Milen, 2004:15).

Capacity building ini menjadi penting untuk dilakukan Pemerintah Indonesia mengingat kondisi lingkungan kerja Indonesia yang cukup memprihatinkan terutama di sektor tenaga kerja. Kondisi dimana berkembangnya tingkat perekonomian Indonesia tidak sejalan dengan penyerapan pengetahuan, teknologi, dan keterampilan pada tenaga kerja Indonesia yang nantinya akan membentuk pembangunan ekonomi di masa depan. Menurut data yang dikeluarkan oleh BPS (2018), jumlah angkatan kerja Indonesia saat ini sebanyak 133,94 juta orang, dimana jumlah angka pengangguran sekitar 6,87 juta orang yang masih terbilang cukup tinggi. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh penduduk bekerja dengan pendidikan rendah (SMP ke bawah). Meskipun beberapa tahun belakangan penduduk bekerja berpendidikan menengah meningkat di Indonesia dari 27,35 persen di tahun 2017 menjadi 28,83 persen di tahun 2018 (BPS, 2018). Sehingga tidak mengherankan bila daya saing industri Indonesia rendah karena ketidakmampuan tenaga kerja untuk meningkatkan atau menyerap keterampilan atau terjadinya ketidaksesuaian keterampilan yang dibutuhkan industri saat ini.

Ketidaksesuaian keterampilan sendiri menjadi salah satu masalah sosial yang kerap dihadapi negara berkembang seperti Indonesia yang diartikan dengan berbagai bentuk ketidakseimbangan antara keterampilan yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja (ILO, 2014). Bentuk ketidaksesuaian keterampilan yang paling sering terjadi adalah kekurangan keterampilan, kesenjangan keterampilan, pendidikan berlebih (atau kurang), kualifikasi berlebih (atau kurang), dan kepunahan keterampilan. Terjadinya ketidaksesuaian keterampilan bisa mengakibatkan alokasi dan penggunaan angkatan kerja menjadi tidak optimal. Ini menimbulkan beban bagi para pekerja, perusahaan dan masyarakat terkait produktivitas, daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga akhirnya dapat berimplikasi pada kinerja perusahaan yang rendah bila pekerjanya tidak terdidik dan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut (ILO, 2017:55). Untuk itu, program MIDEK-IJEPA juga menjadi salah satu sarana bagi pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kapasitas pekerja Indonesia melalui peningkatan keterampilan dan penguasaan teknologi tinggi.

Upaya *capacity building* antara Indonesia dan Jepang khususnya di sektor otomotif sendiri dapat terlihat dari beberapa kegiatan, seperti membuat perencanaan kerja dan anggaran biaya per tahun, studi dasar, pelatihan dan sertifikasi di Indonesia/Jepang, seminar dan *workshop*, ToT (*training of trainer*), pengiriman ahli, penyusunan standar

kualitas, perbaikan kurikulum pendidikan, dsb (Atmawinata et al., 2009:11-12). Beberapa kegiatan yang telah diimplementasikan melalui MIDEK diantaranya, (1) proyek membantu pengembangan sumber daya manusia di industri otomotif, (2) proyek kerja sama untuk mendukung diadopsinya Perjanjian UN/ECE 1958 melalui pengiriman ahli, dan (3) proyek misi pengiriman untuk memperkuat fungsi R&D di lembaga-lembaga uji Indonesia.

Dengan disepakatinya MIDEK-IJEPa ini, pemerintah Indonesia secara tidak langsung menuntut kepada perusahaan multinasional (MNCs) Jepang yang menjalankan usahanya di Indonesia untuk mengupayakan *capacity building* para pekerja Indonesia sehingga mampu bersaing dengan pekerja dari negara asal. Salah satu perusahaan multinasional Jepang yang menjalankan kesepakatan MIDEK-IJEPa dalam upaya *capacity building* pekerja adalah PT.TMMIN. PT.TMMIN merupakan perusahaan multinasional di bawah bendera *Toyota Motor Corporation* (TMC) Jepang. TMC Jepang membangun PT.TMMIN melalui *joint venture* dengan kepemilikan saham 95% dan 5% saham dimiliki PT.Astra International Tbk. Pada Agustus 2016, TMC Jepang mengakuisisi sepenuhnya *Daihatsu Motor Company* (DMC) Jepang. Sehingga dalam perkembangannya saat ini, produk dan pasar DMC berada di bawah TMC Jepang.

Sebelum bernama PT.TMMIN, pada awalnya Toyota Indonesia lahir dari kerja sama TMC Jepang dengan PT. Astra International. Dengan kerja sama kedua perusahaan tersebut, didirikan perusahaan bernama PT. Toyota-Astra Motor (TAM) pada April 1971 sebagai perusahaan importir mobil Toyota. Dua tahun kemudian pada tahun 1973, PT. Multi Astra didirikan sebagai perusahaan perakitan kendaraan yang mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mempercepat industrialisasi di bidang otomotif. Hingga kini berubah nama menjadi PT.TMMIN, bukan hanya sebagai perusahaan perakitan mobil, melainkan sudah memproduksi mobil sendiri dan juga memproduksi berbagai komponen pendukung termasuk mesin. PT.TMMIN saat ini mampu menyerap total tenaga kerja sebanyak 9.300 orang dan menyerap 300 ribu pekerja melalui supplier yang mendukung operasional PT.TMMIN (Chalil, 2015:8-12). PT.TMMIN juga menjadi produsen otomotif terbesar di Indonesia dan juga menjadi produsen Toyota terbesar kedua setelah *Toyota Motor Thailand* (TMT) (JAMA ASEAN, 2018). Pangsa pasar produk Toyota sendiri menjadi pemimpin pasar otomotif di Indonesia mencapai 36,5% (Gaikindo, 2018).

Beberapa hal tersebut mengindikasikan bahwa PT.TMMIN membawa peranan penting bagi sektor otomotif Indonesia, baik bagi pasar ekspor maupun pasar domestik. Selain itu, keberhasilan Toyota sebagai pemegang pangsa pasar otomotif terbesar di Indonesia juga diiringi dengan komitmen Toyota untuk memperkuat riset dan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Menurut Presiden Direktur PT.TMMIN, Warih Andang Tjahjono, riset menjadi hal penting dalam melepas produk otomotif karena terkait dengan investasi dan ketertarikan konsumen. Terkait dengan penguatan SDM, PT.TMMIN setidaknya mengirimkan 10% dari setiap 1.000 karyawannya untuk mengikuti program *Toyota Intra Company Transferee* (ICT) ke luar negeri. Ini dimaksudkan untuk pembangunan produk Toyota di dalam negeri. Karyawan harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang tepat dan persiapan terhadap perkembangan teknologi (Toyota Connect, 2016).

Dalam program pengembangan sumber daya manusia (SDM) sendiri, PT.TMMIN telah dilengkapi dengan pelatihan dan fasilitas latihan yang modern dan berteknologi tinggi serta program yang diadopsi dari Toyota Global ataupun disesuaikan dengan kondisi dalam negeri (Chalil, 2015:86). Selain itu, peningkatan kapasitas pekerja lainnya yang dilakukan oleh PT.TMMIN adalah program *TMMIN Learning Centre* (TLC). Program TLC ini bertujuan untuk mengantisipasi tuntutan terhadap peningkatan kualitas SDM Toyota yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan PT.TMMIN sebagai basis produksi mobil global sekaligus sebagai sarana transfer pengetahuan kepada perusahaan pemasok Toyota, pemerintah, dan masyarakat. PT.TMMIN sendiri sudah memiliki 3 TLC, yaitu TLC 1 dan TLC 3 yang terletak di Karawang, Jawa Barat dan TLC 2 yang terletak di Sunter, Jakarta Utara. Program TLC tersebut juga didukung oleh *trainer* yang sudah berpengalaman dan memegang sertifikasi Toyota Global dan Regional sebanyak kurang lebih 300 orang dan kesemuanya merupakan karyawan PT.TMMIN.

Program lainnya yang dilaksanakan oleh PT.TMMIN dalam meningkatkan kapasitas pekerjaannya adalah dengan melakukan program transfer keahlian serta keterampilan dengan program *Toyota Production System* (TPS) *Jishuken* yang telah dilakukan sejak 2007. *Jishuken* sendiri diambil dari dua kata dalam bahasa Jepang, *Jishu* dan *Kenkyu* yang berarti *self-independent investigation* atau kemampuan untuk melakukan investigasi permasalahan dan membuat rencana serta aktivitas perbaikannya secara mandiri. PT.TMMIN juga melaksanakan program lain seperti *Toyota Eco Youth*

(TEY), *Toyota Indonesia Academy* (TIA), dan kuliah umum TPS serta *Lean Manufacturing Lab* di beberapa universitas di Indonesia.

Penulis tertarik menggunakan studi kasus PT.TMMIN dalam upaya *capacity building* pekerja Indonesia karena penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kerja sama antara Indonesia-Jepang terutama setelah dilakukannya kesepakatan IJEPA dalam upaya *capacity building* pekerja Indonesia dengan studi kasus PT.TMMIN. Untuk itu penulis mengambil judul penelitian “**Kerja Sama Indonesia-Jepang dalam Upaya Capacity Building Pekerja Otomotif Indonesia: Studi Kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT.TMMIN) Periode 2008-2012.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerja sama antara Indonesia-Jepang dengan adanya kesepakatan IJEPA menghasilkan program MIDEK. Program MIDEK tersebut merupakan bentuk kompensasi Jepang kepada Indonesia dengan meningkatkan kapasitas industri manufaktur Indonesia, agar dapat menghasilkan produk-produk yang memenuhi persyaratan pasar Jepang dan memiliki daya saing global. Daya saing industri Indonesia dapat dikatakan rendah, salah satunya disebabkan oleh kurang maksimalnya penyerapan keterampilan dan ketidaksesuaian keterampilan pada para pekerja di Indonesia sehingga tidak sesuai dengan perkembangan industri saat ini. Lalu, bagaimana implementasi kerja sama Indonesia-Jepang dalam upaya *capacity building* pekerja otomotif Indonesia? Dalam penelitian ini, penulis akan fokus kepada kasus program *capacity building* yang terjadi di PT. *Toyota Motor Manufacturing Indonesia* (PT.TMMIN) selama periode 2008-2012. PT.TMMIN menjadi fokus penelitian penulis karena perusahaan tersebut merupakan salah satu MNC Jepang yang menyerap tenaga kerja cukup besar di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi kerja sama Indonesia-Jepang dalam upaya *capacity building* pekerja Indonesia khususnya para pekerja di PT.TMMIN.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. **Manfaat Akademis**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) pekerja Indonesia dan memberikan kontribusi dalam program studi Hubungan Internasional yang berkaitan dengan kerja sama antar pemerintah (G2G) dan kerja sama antara pemerintah dan MNCs (G2B).
- b. **Manfaat Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun data sebagai bahan masukan terutama bagi pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) pekerja Indonesia khususnya pekerja di perusahaan multinasional (MNCs).

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: Bagian ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka: Bagian ini berisi uraian mengenai *literature review*, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan asumsi.

Bab III Metode Penelitian: Bagian ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan waktu dan lokasi penelitian.

Bab IV Pembahasan: Menjelaskan kerja sama antara Indonesia-Jepang dalam upaya *capacity building* para pekerja Indonesia terutama di PT.TMMIN.

Bab V Hasil dan Analisa: Mengidentifikasi masalah apa yang muncul dalam proses implementasi kerja sama dan bagaimana Indonesia-Jepang menyelesaikan masalah tersebut terkait kerja sama dalam upaya *capacity building* para pekerja Indonesia di PT.TMMIN.

Bab VI Kesimpulan: Pada bagian akhir skripsi ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan menjelaskan hasil penelitian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.